

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik, memunculkan sebuah konsep yang berkaitan dengan pembangunan. Saul M.Katz dalam Ngusmanto (2015:26) menegaskan bahwa pembangunan merupakan pergeseran dari satu kondisi nasional menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik namun yang dipandang kondisi nasional yang lebih baik, berbeda dari satu Negara ke Negara lain atau satu periode ke periode lain. Negara maju dengan Negara yang sedang berkembang memiliki orientasi pembangunan yang berbeda, namun meskipun memiliki perbedaan orientasi yang ingin dicapai, baik Negara maju maupun Negara berkembang menginginkan perubahan kondisi nasional yang semakin baik.

Sebagai upaya melaksanakan perubahan kondisi nasional ke arah yang lebih baik, pada September 2015 PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) telah memutuskan sebuah agenda besar pembangunan dunia yang disepakati oleh negara-negara di dunia yang dikenal dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai agenda global yang menggantikan MDGs (*Millennium Development Goals*). SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesejahteraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup (<http://sdgsindonesia.or.id>). SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan global, salah satu tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam

segala bentuk dimanapun. Mengakhiri kemiskinan merupakan tujuan pertama dalam agenda SDGs, dengan pertimbangan bahwa dewasa ini kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di berbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) angka kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dengan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Bawah Garis Kemiskinan (dalam Juta Orang)

2015		2016		2017	
Maret	September	Maret	September	Maret	September
28,59	28,51	28,01	27,76	27,77	-

Sumber : <https://www.bps.go.id>, diakses 12-8-2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan kondisi September 2016. Selain meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia juga mengalami peningkatan pada maret 2017 mencapai 1,83, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,74 dari September 2016 (<http://ekonomi.kompas.com>). Angka tersebut juga diikuti dengan meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, kepala BPS Suharyanto megatakan bahwa “pada maret 2017, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada maret 2017 (<http://ekonomi.kompas.com>, diakses 12-8-17)”. Angka tersebut menunjukkan

bahwa angka kemiskinan di Indonesia relative masih tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi Indonesia.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia, permasalahan kemiskinan diantaranya timbul karena rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rendahnya pendapatan dari masyarakat, selain hal tersebut timbulnya kemiskinan juga disebabkan karena masyarakat mengalami ketidakberdayaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, melalui berbagai pendekatan dan berbagai kebijakan serta berbagai program, namun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan masih belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut (Ras, 2013:58). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Setiadi dan Kolip dalam Ras, (2013:59) yaitu:

1. Program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan cenderung berfokus pada program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Program bantuan yang berdasarkan pada kedermawanan pemerintah, tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, karena menimbulkan sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.
2. Kurangnya pemahaman tentang penyebab kemiskinan, bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi tanpa adanya pertimbangan aspek sosial, budaya dan politik masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dalam mengatasi masalah kemiskinan seyogyanya upaya yang dilakukan lebih mengarah pada upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Masyarakat diberikan akses untuk dapat menjangkau sumber daya yang mampu menopang keberlangsungan hidup, oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk membuka akses bagi masyarakat dalam menjangkau sumberdaya-sumberdaya tersebut, program penurunan angka kemiskinan difokuskan untuk menumbuhkan ekonomi produktif, dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha tanpa anggunan pada masyarakat miskin, selain itu masyarakat miskin juga diberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Dengan diberikannya program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat secara bertahap nantinya dapat membebaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah (Ras,2013:59). Peran pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat bergeser dari yang semula mengendalikan menjadi yang mengarahkan (*steering rather than rowing*), pemerintah memberikan peran kepada masyarakat dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan. Hal ini berkaitan dengan paradigma administrasi publik *good governance*.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2003 dalam Asmawi (2010:82) *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* (kebutuhan barang dan jasa pelayanan publik). Sedangkan dalam kaitannya dengan masyarakat, Hubbard dalam Asmawi (2010:82) mengatakan bahwa "*governance is more than government, governance is how society steer themselves*". Berdasarkan pengertian tersebut *Governance* dapat dilihat sebagai proses dengan cara apa lembaga negara,

entitas bisnis dan kelompok warga masyarakat mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan yang ada. Berkaitan dengan pendapat tersebut diketahui bahwa *governance* bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh Negara (pemerintah) terhadap warga masyarakat, namun merupakan cara masyarakat dan individu didalamnya mengatur semua aspek kehidupan bersama, atau dapat dikatakan cara bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan kedepan lebih memperhatikan prinsip pemberdayaan, sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengatur dirinya dan apabila masyarakat atau sebagian dari masyarakat belum mampu untuk berdaya maka harus diberdayakan.

Sebagai proses, pemberdayaan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013:61) diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Berdasarkan pengertian tersebut sebagai sebuah proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi mendapatkan kesempatan dan mengakses sumberdaya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidupnya (baik secara individu, kelompok, dan masyarakat), pemberdayaan dianggap sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan upaya untuk memberikan pelayanan secara maksimal pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memberikan peran kepada individu untuk mandiri dan berperan sebagai aktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan termasuk dalam bidang ekonomi.

Sebagai upaya untuk memberikan peran kepada individu atau masyarakat untuk mandiri dan berperan sebagai aktor utama dalam meningkatkan taraf kehidupannya, pemerintah membuat kebijakan terkait pendirian lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam pembentukan BUMDes, desa diberikan wewenang untuk mendirikan BUMDes, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan didirikan atas dasar keinginan masyarakat desa yang tujuannya untuk mengelola potensi desa, dengan harapan ketika potensi desa mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan

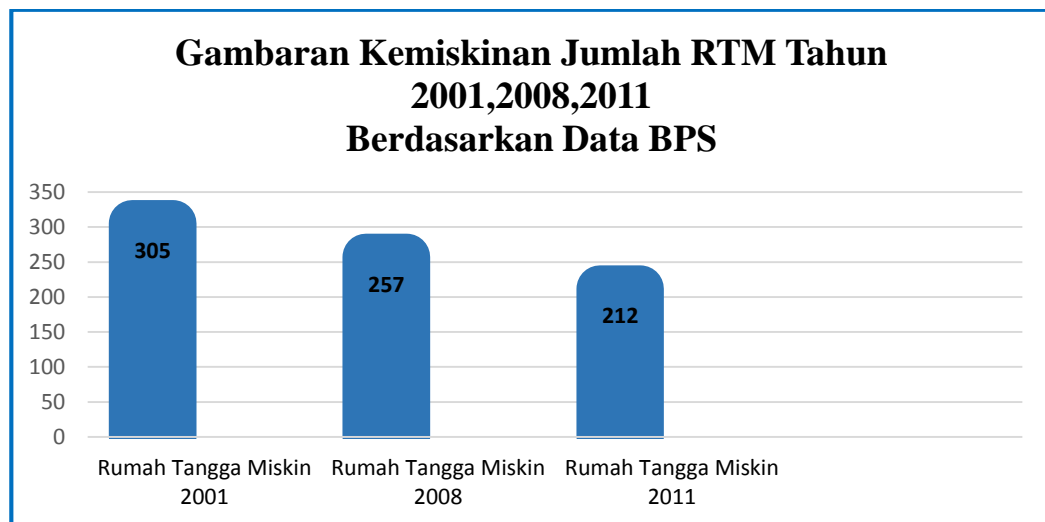
dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuan pendirian BUMDes adalah untuk:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan tujuan pendirian BUMDes tersebut dapat diketahui bahwa sebagai pilar ekonomi desa, BUMDes dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta pendapatan desa. Memberdayakan masyarakat melalui BUMDes merupakan cara untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak berdaya untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

BUMDes yang dianggap telah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi pengelola potensi desa dan berdampak pada penurunan jumlah

penduduk miskin, salah satunya adalah BUMDes Maju Makmur yang terletak di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah penduduk miskin di Desa Minggirsari pada tahun 2001-2011 yang semakin berkurang.



Gambar 1. Gambaran Kemiskinan Berdasarkan Data BPS Th.2001,2008,2011  
Sumber : Data Kepala Desa Minggirsari

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Minggirsari semakin berkurang, berdasarkan data BPS tahun 2001 Desa Minggirsari memiliki jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 305 KK. Didasari dengan adanya jumlah penduduk miskin yang tinggi di Desa Minggirsari maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan unit simpan pinjam di BUMDes Maju Makmur. Pada tahun 2007 bertepatan dengan adanya program penguatan UPK dan BUMDes percontohan dari provinsi Jawa Timur maka dibentuklah BUMDes Maju Makmur, yang didalamnya terdapat unit simpan pinjam. Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Desa Minggirsari dengan melakukan pemberdayaan kepada



masyarakat melalui pemberian dana pinjaman bagi masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses modal, masyarakat miskin yang telah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya dapat melakukan pinjaman di BUMDes Maju Makmur. Hal ini sesuai dengan pendapat Robinson dalam Subagio,dkk (2013:16) bahwa pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan.

Setelah diadakan klarifikasi BPS pada Tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin di Desa Minggirsari berkurang menjadi 257 KK, sampai pada tahun 2011 jumlah tersebut semakin berkurang menjadi 212 KK. Hingga pada tahun 2016 jumlah masyarakat miskin di Desa Minggirsari mengalami penurunan menjadi 196 (Data Desa Minggirsari, 2016). Berdasarkan pemaparan dari Bapak Hari selaku Direktur BUMDes Maju Makmur, berkurangnya jumlah penduduk miskin di Desa Minggirsari salah satu penyebabnya adalah karena adanya BUMDes Maju Makmur. Bapak Hari menyatakan bahwa ;

“BUMDes Maju Makmur sebagai lembaga ekonomi Desa, juga ikut berperan dalam penurunan jumlah penduduk miskin walaupun efek atau dampak yang diberikan tidak terlihat secara langsung, hal tersebut bisa dilihat bahwa semenjak didirikannya BUMDes pada tahun 2008 jumlah KK yang masuk kategori RTM menurun, salah satu upaya yang diberikan BUMDes adalah dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui Unit Usaha Simpan Pinjam Induk dan Unit Simpan Pinjam Pokmas yang sekarang terdiri dari 8 pokmas”. (wawancara,28 Juli 2017)

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Maju Makmur berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan BUMDes Maju Makmur yang ikut berpartisipasi dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas atau taraf hidupnya adalah Unit Usaha Simpan

Pinjam. Terdapat tiga jenis usaha simpan pinjam di BUMDes Maju Makmur yaitu Simpan Pinjam Induk, Unit Simpan Pinjam Melalui Pokmas (Kelompok Masyarakat), dan Simpan Pinjam Tanpa Bunga. Unit simpan pinjam induk lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha dan ingin menambah modal usahanya, sedangkan unit simpan pinjam melalui POKMAS (Kelompok Masyarakat) dan simpan pinjam tanpa bunga diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang ingin memperoleh modal usaha. Sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes diperbolehkan untuk memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Memberikan akses kredit dan pinjaman kepada masyarakat desa Minggirsari dianggap merupakan strategi pemberdayaan yang lebih tepat dibandingkan dengan memberikan bantuan atau hibah dari pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Saikoni selaku Kepala Desa Minggirsari yang menyatakan bahwa:

“kita mencoba untuk memberikan penghasilan yang lebih kepada mereka dengan mereka tidak istilahnya *ora njakne hibah gitu lo* (tidak mengandalkan hibah) jadi mereka kalau pinjam ya harus mengembalikan jangan kalau seperti ada bantuan kambing begitu kambing di berikan belum lama kambing sudah di jual kalau nanti mereka di pinjami tapi harus mengembalikan kan masih ada usaha agar berhasil kan tapi kalau sudah tidak ada keinginan untuk mengembalikan kan ya sudah mereka tidak ada usaha bagaimana kegiatannya berhasil” (Wawancara, 2 Oktober 2017 jam 9.00 di Kantor Kepala Desa Minggirsari)

Program simpan pinjam yang terdapat di BUMDes Maju Makmur menjadi jalan keluar dalam rangka menjangkau keterbatasan modal bagi masyarakat miskin dan memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Desa Minggirsari, karena dengan adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dana usaha, masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan dapat berdampak pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur sehingga dapat memberikan kontribusinya dalam penurunan jumlah penduduk miskin di Desa Minggirsari. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur?
2. Bagaimana dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur .

2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan oleh peneliti adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai pemberdayaan masyarakat. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai bahan rujukan untuk melihat upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan, penulis memaparkan hal-hal yang mendasari atau melatarbelakangi masalah dari tema yang penulis angkat, yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan melalui BUMDes, selain itu terdapat pula rumusan masalah dari penulisan skripsi ini, tujuan penulisan serta manfaat dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka peneliti memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang dijadikan acuan bagi peneliti dalam penulisan skripsi. Terdapat pula kerangka pemikiran dan konsep penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab metode penelitian, penulis memaparkan terkait dengan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. Serta pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, fokus penelitian sumber data, teknik pengumpulan data hingga metode analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian yang diperoleh.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan penulis memaparkan hal-hal yang menjadi permasalahan yang penulis angkat dan analisis terkait permasalahan yang penulis bahas berdasarkan teori yang penulis gunakan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab kesimpulan dan saran penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan memberikan saran dan usulan untuk perbaikan terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat.